

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang sangat beragam. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan tersebut menyebabkan terjadinya disparitas sosial dan ekonomi yang signifikan antara kawasan barat dan timur Indonesia. Wilayah-wilayah padat seperti Pulau Jawa mengalami tekanan demografis yang tinggi akibat laju pertumbuhan penduduk yang cepat, keterbatasan lahan, serta persaingan yang ketat di sektor tenaga kerja. Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat untuk melakukan mobilitas ke daerah lain yang dinilai memiliki peluang ekonomi lebih menjanjikan.

Sebaliknya, wilayah-wilayah di luar Jawa seperti Kepulauan Riau berkembang menjadi kawasan industri dan perdagangan yang menjadi magnet baru bagi arus migrasi karena tersedianya lapangan kerja, infrastruktur yang memadai, serta posisi geografisnya yang strategis di jalur perdagangan internasional (Widhiyoga, 2024). Sebagai provinsi yang berada di wilayah perbatasan, Kepulauan Riau memiliki peran penting dalam dinamika mobilitas penduduk nasional. Kedekatannya dengan Singapura dan Malaysia menjadikan provinsi ini tidak hanya sebagai wilayah transit, tetapi juga sebagai tujuan utama migrasi bagi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Dari

beberapa wilayah di Kepulauan Riau, Kota Batam menempati posisi paling menonjol sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan industri terbesar di provinsi tersebut. Letak geografisnya yang strategis menjadikan Batam berfungsi ganda, yakni sebagai tujuan migrasi internal dan titik transit pekerja migran yang akan ke luar negeri.

Fenomena perpindahan penduduk tersebut merupakan respons terhadap ketimpangan ekonomi dan kesempatan kerja antarwilayah. Santoso (2020) menjelaskan bahwa migrasi manusia, khususnya migrasi lintas negara, tidak hanya dipahami sebagai perpindahan fisik, tetapi juga sebagai proses sosial-ekonomi yang berkaitan dengan pencarian kehidupan yang lebih layak. Dalam konteks Indonesia, migrasi internasional sering menjadi pilihan bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya tingkat pendapatan di daerah asal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa arus migrasi yang terjadi di Batam tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga terkait langsung dengan mobilitas tenaga kerja internasional (Rahman, 2022). Kota Batam sebagai pusat industri dan wilayah perbatasan internasional menjadikannya bukan hanya simpul ekonomi, tetapi juga titik strategis mobilitas tenaga kerja lintas negara. Dalam konteks ini, fenomena migrasi di Batam menunjukkan kompleksitas yang tinggi karena mencakup dua bentuk utama, yaitu migrasi legal (prosedural) dan ilegal (non-prosedural). Sejalan dengan itu, Rahmadana (2020) menegaskan bahwa migrasi tenaga kerja merupakan bagian dari dinamika wilayah, di mana daerah dengan keterbatasan ekonomi mendorong penduduknya untuk keluar,

sementara daerah atau negara tujuan menawarkan peluang kerja dan pendapatan yang lebih tinggi.

Faktor ekonomi tetap menjadi pendorong utama, namun kedekatan geografis, kesamaan etnis, dan jaringan sosial antarwilayah turut memperkuat arus migrasi tidak resmi di kawasan ini. Sejalan dengan itu, Suryaningsih (2023) menegaskan bahwa wilayah perbatasan seperti Batam memiliki karakteristik unik sebagai daerah transit migran karena kombinasi antara peluang kerja di sektor industri dan kemudahan akses transportasi laut menuju Singapura dan Malaysia. Berdasarkan data Dinas Kependudukan Kota Batam tahun 2025, jumlah masyarakat Jawa Barat yang berdomisili di Batam mencapai sekitar 50.000 jiwa.

Fenomena migrasi yang terjadi di Batam dapat dipahami melalui perspektif teori migrasi yang dikemukakan oleh Lee (1966). Teori ini menjelaskan bahwa keputusan seseorang untuk bermigrasi tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi semata, tetapi merupakan hasil interaksi antara faktor pendorong (push factors) dari daerah asal, faktor penarik (pull factors) di daerah tujuan, hambatan antar wilayah (intervening obstacles), serta karakteristik individu (personal factors). Keempat faktor ini saling berinteraksi dan membentuk pertimbangan kompleks yang menentukan arah serta pola migrasi seseorang (Rahmadana, 2020). Dalam konteks ini, arus migrasi masyarakat Jawa Barat menuju Batam dapat dipandang sebagai hasil dari tekanan ekonomi di daerah asal serta daya tarik peluang kerja dan kedekatan geografis Batam dengan negara tujuan migrasi seperti Singapura dan Malaysia.

Dalam praktiknya, migrasi tenaga kerja dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur prosedural dan non-prosedural. Jalur prosedural merupakan proses penempatan tenaga kerja yang dilakukan melalui mekanisme resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti pendaftaran, kelengkapan dokumen, perjanjian kerja, serta perlindungan hukum. Sementara itu, jalur non-prosedural merupakan proses keberangkatan yang tidak melalui mekanisme resmi sehingga pekerja tidak memiliki perlindungan yang memadai serta menghadapi ketidakpastian dalam pekerjaan dan pendapatan.

PMI prosedural cenderung memiliki pendapatan yang lebih stabil dan terjamin karena dilindungi oleh kontrak kerja resmi serta memperoleh akses terhadap layanan perlindungan tenaga kerja dan lembaga keuangan formal (Sinambela, 2025). Kondisi tersebut mendorong pola pemanfaatan pendapatan yang lebih produktif, seperti menabung, melakukan investasi kecil, serta membiayai pendidikan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pekerja migran adalah WNI yang bekerja dan menerima upah di luar negeri (Pasal 1 angka 2). UU ini mewajibkan penempatan PMI melalui prosedur resmi, seperti pendaftaran, verifikasi dokumen, perjanjian kerja, pelatihan, serta perlindungan sebelum hingga setelah bekerja (Pasal 13–19). Selain itu, UU ini juga melarang pengiriman pekerja migran tanpa memenuhi prosedur yang ditetapkan (Pasal 69) dan menetapkan sanksi pidana bagi pihak yang melakukan penempatan secara ilegal atau non-prosedural (Pasal 81–83).

Namun demikian, dalam praktiknya sebagian pekerja masih menghadapi ketidakpastian pendapatan akibat ketiadaan kontrak kerja dan lemahnya perlindungan hukum. Aini (2025) menemukan bahwa pekerja migran non-prosedural di wilayah perbatasan, termasuk Kepulauan Riau, cenderung memanfaatkan pendapatan untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari karena tidak adanya jaminan pendapatan bulanan.

Fenomena tersebut diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025) yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Batam mencapai 1,28 juta jiwa dengan pertumbuhan sebesar 2,1 persen. Namun, pertumbuhan tersebut tidak sebanding dengan kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Batam pada tahun 2024 masih sebesar 7,68%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi.

Kondisi ini berdampak pada kehidupan migran, khususnya masyarakat Jawa Barat di Batam. Pada umumnya, mereka datang untuk bekerja di sektor industri dan jasa seperti buruh pabrik, pekerja bangunan, dan pekerjaan informal lainnya. Namun, pendapatan yang diperoleh sering kali belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Keterbatasan tersebut mendorong mereka untuk mencari alternatif pekerjaan ke luar negeri, terutama ke Singapura dan Malaysia, dengan harapan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, migrasi yang dilakukan tidak hanya bersifat internal, tetapi juga berlanjut menjadi migrasi internasional sebagai strategi untuk meningkatkan kondisi ekonomi.

Dalam konteks tersebut, kehidupan migran masyarakat Jawa Barat di Kota Batam menunjukkan pola yang relatif seragam. Pada tahap awal, mereka datang ke Batam dengan tujuan untuk bekerja di sektor industri dan jasa, seperti buruh pabrik, pekerja konstruksi, pekerja jasa, serta pekerjaan informal lainnya. Namun, penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut sering kali belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara memadai. Kondisi ekonomi yang terbatas tersebut menyebabkan sebagian dari mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar secara konsisten.

Keterbatasan tersebut kemudian mendorong mereka untuk mencari alternatif pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi di luar negeri. Negara seperti Singapura dan Malaysia menjadi tujuan utama karena kedekatan geografis serta peluang kerja yang dianggap lebih menjanjikan. Dengan demikian, keputusan untuk bekerja ke luar negeri merupakan bentuk strategi ekonomi yang dilakukan oleh migran akibat keterbatasan pendapatan yang diperoleh selama bekerja di Batam.

Meski data BPS publik tidak mencatat jumlah absolut masyarakat Jawa Barat di Batam secara terpisah, persentase migran masuk risen sebesar 1,58% menunjukkan adanya kecenderungan mobilitas penduduk Jawa Barat yang cukup signifikan ke berbagai wilayah tujuan, termasuk kawasan industri seperti Batam. Hal ini memperkuat bahwa migrasi menjadi salah satu strategi yang dilakukan masyarakat Jawa Barat dalam upaya meningkatkan kondisi ekonomi. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam tahun 2025, jumlah masyarakat Jawa Barat yang

berdomisili di Batam mencapai sekitar 50.000 jiwa. Jumlah ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Barat merupakan salah satu kelompok migran terbesar di Kota Batam dan memiliki kontribusi signifikan dalam dinamika tenaga kerja di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas 2023) yang diolah oleh GoodStats dari data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase PMI yang berangkat melalui jalur non-prosedural mencapai sekitar 34,4 persen. Selain itu, terdapat pola tertentu dalam cara PMI non-prosedural memperoleh informasi pekerjaan di luar negeri. Mayoritas, yaitu sebesar 57,4 persen, mendapatkan informasi melalui jaringan teman atau keluarga, sementara 26,8 persen direkrut langsung oleh pemberi kerja atau perekrut perorangan. Sisanya, sebesar 9,8 persen melalui agen swasta, 3,5 persen melalui agen pemerintah, dan 2,5 persen melalui jalur lainnya.

Temuan ini menunjukkan bahwa akses informasi pekerjaan melalui jejaring sosial lebih dominan dibandingkan melalui mekanisme resmi. Hal ini sekaligus mencerminkan keterbatasan akses terhadap sistem penempatan formal serta perlindungan pemerintah. Fenomena ini menjadi penting dalam memahami dinamika migrasi tenaga kerja, khususnya bagi calon PMI asal Jawa Barat yang berada di wilayah transit seperti Kota Batam sebelum berangkat ke luar negeri.

Selain faktor ekonomi, dinamika migrasi di Batam juga dipengaruhi oleh keberadaan pelabuhan internasional dan jalur laut terbuka yang memudahkan mobilitas tenaga kerja lintas batas. Sepanjang tahun 2023, Imigrasi Batam

mencatat lebih dari 2.700 calon PMI non-prosedural berhasil dicegah keberangkatannya, yang menunjukkan tingginya intensitas migrasi non-prosedural di wilayah ini (Rahman, 2023). Di sisi lain, Batam juga menjadi lokasi keberangkatan PMI prosedural dengan dukungan dokumen resmi. Kondisi ini menjadikan Batam sebagai wilayah yang mempertemukan dua bentuk migrasi tersebut.

Fenomena migrasi tenaga kerja di Kota Batam tidak hanya melibatkan masyarakat lokal, tetapi juga pekerja migran dari berbagai daerah, khususnya Jawa Barat. Pemilihan fokus pada PMI asal Jawa Barat didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, Jawa Barat merupakan provinsi penyumbang pekerja migran terbesar secara nasional. Kedua, Batam berfungsi sebagai wilayah transisi strategis bagi calon pekerja migran yang tidak dapat mengakses jalur prosedural secara langsung ke luar negeri, sehingga menjadikan kota ini sebagai alternatif sebelum menuju negara tujuan.

Berdasarkan data BP2MI (2024), jumlah PMI asal Jawa Barat mencapai 64.221 orang atau sekitar 23 persen dari total penempatan nasional. Sebagian dari mereka terlebih dahulu bermigrasi ke Batam untuk bekerja sebelum melanjutkan ke luar negeri. Pola ini menunjukkan adanya migrasi berlapis antara migrasi internal dan migrasi internasional (Rusli, 2022). Sejalan dengan itu, data BPS (2024) menunjukkan bahwa kontribusi PMI asal Jawa Barat masih berada pada kisaran 22,8 persen dengan kecenderungan peningkatan keberangkatan non-prosedural.

Data Open Data Jawa Barat (2024) menunjukkan bahwa penempatan PMI mengalami fluktuasi pada periode 2017–2023, dengan peningkatan kembali setelah masa pandemi. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan minat terhadap migrasi ke luar negeri, termasuk melalui jalur non-prosedural yang dianggap lebih mudah diakses. Perubahan tersebut juga berdampak pada pola pemanfaatan pendapatan, di mana sebelum bekerja ke luar negeri pendapatan lebih difokuskan pada kebutuhan konsumsi dasar, sedangkan setelah menjadi PMI sebagian mulai dialokasikan untuk tabungan, pendidikan, dan investasi usaha kecil.

Meskipun jalur prosedural memberikan perlindungan kerja dan akses keuangan formal, sebagian pekerja migran tetap memilih jalur non-prosedural. Aini et al. (2025) menyebutkan bahwa pekerja migran non-prosedural merupakan pekerja yang berangkat tanpa melalui mekanisme resmi dan tidak memiliki dokumen lengkap, yang umumnya difasilitasi oleh jaringan informal di wilayah perbatasan (Fathullah, 2023). Perbedaan status migrasi ini berdampak pada stabilitas pendapatan dan pola perilaku ekonomi. Dalam perspektif teori konsumsi Keynes, ketidakpastian pendapatan mendorong individu untuk lebih berorientasi pada konsumsi jangka pendek dibandingkan tabungan dan investasi (Keynes, 1936; Harahap, 2025).

Namun demikian, pembahasan mengenai migrasi tenaga kerja tidak hanya dapat dilihat dari aspek mobilitas dan peningkatan pendapatan semata, tetapi juga perlu dianalisis dari bagaimana pendapatan tersebut dimanfaatkan dalam kehidupan rumah tangga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pemanfaatan

pendapatan menjadi indikator penting dalam melihat perubahan kondisi sosial ekonomi karena mencerminkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sekaligus merencanakan kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, terdapat perbedaan kondisi sosial ekonomi yang cukup nyata antara sebelum dan sesudah menjadi PMI mandiri. Sebelum bekerja ke luar negeri, sebagian besar informan berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas, dengan jenis pekerjaan yang bersifat informal dan tidak memiliki kepastian pendapatan. Informan bekerja sebagai buruh harian, pekerja jasa, serta pekerjaan lain yang bergantung pada ketersediaan pekerjaan, sehingga penghasilan yang diperoleh cenderung tidak stabil.

Dalam kondisi tersebut, pemanfaatan pendapatan sepenuhnya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, seperti kebutuhan konsumsi, pembayaran listrik, air, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Pendapatan yang diperoleh sering kali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian, bahkan dalam kondisi tertentu masih mengalami kekurangan. Hal ini menyebabkan tidak adanya alokasi untuk tabungan maupun investasi. Kondisi ini juga tercermin dari tempat tinggal yang masih bersifat sementara serta belum adanya kepemilikan aset ekonomi.

Sebaliknya, setelah menjadi PMI mandiri, terjadi perubahan dalam kondisi sosial ekonomi. Peningkatan pendapatan memungkinkan para pekerja migran mandiri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sekaligus mulai mengelola pendapatan secara lebih terencana. Sebagian pendapatan mulai dialokasikan

untuk tabungan, pendidikan anak, serta membantu kebutuhan keluarga di daerah asal. Selain itu, beberapa informan mulai memiliki aset seperti kendaraan, emas, maupun rumah sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran pola pemanfaatan pendapatan dari yang sebelumnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek menjadi lebih produktif dan berorientasi jangka panjang. Dengan demikian, migrasi sebagai PMI tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi dan peningkatan kualitas hidup keluarga.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rumah tangga PMI dengan pendapatan yang fluktuatif cenderung memiliki tingkat konsumsi yang lebih tinggi dan kemampuan menabung yang lebih rendah, sementara literasi keuangan dan pendampingan berperan penting dalam mendorong pemanfaatan pendapatan secara produktif (Rahmawati, 2024; Cahyanti & Sugiharti, 2022; Rahmadani, 2024). Namun demikian, kajian yang secara khusus menempatkan PMI mandiri asal Jawa Barat di Kota Batam sebagai fokus utama penelitian masih terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam mengenai pola pemanfaatan pendapatan Pekerja Migran Indonesia asal Jawa Barat di Kota Batam, khususnya yang bekerja secara mandiri, serta bagaimana pemanfaatan tersebut berkontribusi terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemanfaatan pendapatan pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jawa Barat di Kota Batam yang bekerja *non-prosedural* (mandiri)?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian dimaksudkan untuk menjawab semua permasalahan yang telah dirumuskan, Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis pemanfaatan pendapatan pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jawa Barat di Kota Batam yang bekerja melalui jalur non-prosedural (mandiri).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu sosiologi, khususnya dalam kajian sosiologi migrasi dan ekonomi tenaga kerja. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya pemahaman terhadap Teori kosumsi kaynes dengan mengaplikasikannya pada konteks migrasi ganda (internal dan internasional) yang terjadi di wilayah perbatasan seperti Kota Batam. Penelitian ini berupaya menjelaskan keterkaitan antara faktor pendorong, penarik, hambatan antar wilayah, serta karakteristik individu dalam memengaruhi keputusan migrasi dan pemanfaatan pendapatan oleh pekerja migran. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperluas kerangka analisis teoritis mengenai hubungan antara status migrasi (*prosedural* dan *non-prosedural*) dengan pola perilaku ekonomi dan kesejahteraan keluarga migran, sehingga

dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang yang relevan

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, lembaga perlindungan pekerja migran, serta masyarakat di wilayah perbatasan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi yang lebih tepat sasaran, khususnya bagi pekerja migran *non-prosedural* atau mandiri. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang pola pemanfaatan pendapatan, pemerintah dapat mengembangkan program peningkatan literasi keuangan, pengelolaan remitansi, serta akses terhadap lembaga keuangan formal bagi PMI dan keluarganya.